

### **BAB III**

#### **ANALISA IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PENDIDIKAN**

#### **DAERAH OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009**

##### **A. Implementasi Program Jaminan Pendidikan Daerah**

Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah atau JPD untuk siswa pemegang KMS penulis mencoba mengamati dan menganalisis dari rencana kerja UPT Jaminan Pendidikan Daerah selaku pelaksana program. Adapun rencana kegiatan meliputi :

##### **1. Penyusunan Tim Pelaksana Jaminan Pendidikan Daerah**

Pelaksana dalam suatu implementasi program juga berpengaruh dalam menentukan keberhasilan. Suatu kebijakan akan berhasil jika dalam implementasinya didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta kualitas yang unggul. Sebaliknya jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan maka implementasi cenderung tidak efektif<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Budi, Winarno.Op.cit.Hal 181

Program Jaminan Pendidikan Daerah atau JPD merupakan suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Yogyakarta dengan tujuan membantu peserta didik yang berasal dari keluarga miskin untuk tetap memperoleh pendidikan selama 12 tahun.<sup>34</sup> Program pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari adanya kebijakan Pendataan Keluarga Miskin oleh pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pelaksana kebijakan. Dengan adanya kebijakan pendataan keluarga miskin akan diperoleh data keluarga miskin di kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan atau parameter yang telah ditetapkan. Untuk dapat melaksanakan operasional kegiatan program Jaminan Pendidikan Daerah atau JPD, pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan membentuk Unit Pelaksana Teknis atau UPT Jaminan Pendidikan Daerah yang disahkan melalui Peraturan Walikota No.37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Jaminan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan.

Unit Pelaksana Teknis atau UPT Jaminan Pendidikan Daerah merupakan pelaksana operasional JPD yang berfungsi mengelola segala kegiatan Jaminan Pendidikan Daerah yang mana antara lain :<sup>35</sup>

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, monitoring, dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan jaminan pendidikan daerah bagi masyarakat,

---

<sup>34</sup> Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2009 Bab II Pasal 2 huruf (a) tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah

<sup>35</sup> Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

- b. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan, dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan jaminan pendidikan daerah bagi masyarakat,
- c. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya,
- d. Menyusun data jumlah peserta didik dari keluarga miskin di daerah untuk berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait,
- e. Melakukan verifikasi terhadap permohonan dana jaminan pendidikan daerah yang tidak termasuk dalam data keluarga miskin,
- f. Menganalisis data dan informasi untuk disajikan dalam dokumentasi data,
- g. Mengklasifikasi data berdasarkan jenjang sekolah, kelas sesuai kebutuhan,
- h. Menetapkan peserta didik dari keluarga miskin yang berhak mendapatkan dana jaminan pendidikan daerah dengan keputusan Kepala UPT yang diketahui oleh Kepala Dinas,
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran dan pemanfaatan dana jaminan pendidikan,
- j. Mengelola dan menyiapkan klarifikasi terhadap pengaduan masyarakat,
- k. Melaksanakan sosialisasi program dana jaminan pendidikan ke masyarakat,
- l. Melaksanakan pendataan dan menghimpun sumber dana jaminan pendidikan,
- m. Mengelola dana jaminan pendidikan daerah sesuai dengan standar pengelolaan keuangan daerah,

- n. Menyalurkan dana jaminan pendidikan daerah berdasarkan penetapan data penerima jaminan pendidikan melalui satuan pendidikan yang bersangkutan,
- o. Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat / lembaga yang peduli pada pendidikan untuk menghimpun dana,
- p. Membuat laporan-laporan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana,
- q. Memberikan stimulasi bagi peserta didik yang berprestasi,
- r. Melaksanakan ketatusahaan dan urusan rumah tangga UPT,
- s. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT,
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

UPT Jaminan Pendidikan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan. Kepala UPT JPD membawahi Kepala Sub bagian Tata usaha dan tiga staf UPT Jaminan Pendidikan Daerah Yogyakarta. Kepala UPT JPD memiliki tanggungjawab untuk mengelola seluruh kegiatan pelaksanaan terkait dengan Jaminan Pendidikan Daerah.

Melihat begitu banyaknya tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh UPT JPD perlu adanya komunikasi yang terencana serta fasilitas yang mendukung agar rincian tugas dan fungsi dapat disalurkan dengan baik. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Mannarima. Berikut petikan wawancara :

*“tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh UPT JPD sangat banyak dan perlu adanya rencana serta komunikasi yang baik agar informasi yang ada dapat tersalurkan dengan baik.”*

## **2. Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah kebijakan atau program. Sosialisasi merupakan suatu tahap pengenalan dari suatu program kepada seluruh jajaran pelaksana program maupun masyarakat sebagai sasaran program.<sup>36</sup> Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat mendukung tercapainya keberhasilan program kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Program Jaminan Pendidikan atau JPD merupakan suatu program yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat miskin berpenduduk kota Yogyakarta. Program ini bersifat membantu artinya tidak secara gratis diberikan tetapi membantu terpenuhinya biaya pendidikan.<sup>37</sup> Dalam kegiatan sosialisasi sendiri diperlukan adanya komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan serta para pelaksana kebijakan agar informasi yang diberikan sesuai dengan tujuan ditetapkan program kebijakan. Adapun kegiatan sosialisasi ini menyangkut beberapa penjelasan mengenai apa itu program Jaminan Pendidikan Daerah, persyaratan mendapatkan program JPD, prosedur yang harus dilakukan oleh warga masyarakat miskin kota Yogyakarta yang bersekolah didalam kota dan luar kota Yogyakarta. Adapun persyaratan untuk

<sup>36</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mawardi pada hari Senin tanggal 15 November 2010 pukul 08.00

<sup>37</sup> Ibid.

mendapatkan JPD adalah peserta didik (anak sekolah) yang bersekolah didalam maupun luar kota Yogyakarta yang memiliki Kartu Menuju Sehat atau KMS yang telah diketahui oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Yogyakarta. Adapun persyaratan untuk mendapatkan JPD antara lain memenuhi terpenuhinya ketentuan sebagai berikut:<sup>38</sup>

a. Penduduk kota yang bersekolah di dalam kota Yogyakarta.

Untuk Melengkapi data yang diperlukan untuk mendapatkan JPD antara lain: memiliki kartu menuju sejahtera atau KMS, memiliki kartu keluarga atau C1, memiliki akta kelahiran (untuk anak kandung AK, untuk anak angkat AA, dan untuk anak tiri AT), memiliki keterangan bahwa peserta didik telah diterima atau sedang bersekolah di sekolah yang berada di kota Yogyakarta, semua persyaratan diatas harus diverifikasi oleh kelurahan setempat dan dilegalisir oleh DINSOSNAKERTRANS kota Yogyakarta. Selanjutnya dari kelengkapan tersebut peserta didik dan orang tua peserta didik menyerahkan kepada pihak sekolah sesuai dengan sekolah yang bersangkutan, selanjutnya dari pihak sekolah akan menyerahkan ke UPT Jaminan Pendidikan kota Yogyakarta.

b. Penduduk kota Yogyakarta yang bersekolah di luar kota Yogyakarta.

Untuk melengkapi data yang diperlukan untuk mendapatkan JPD antara lain : memiliki kartu menuju sejahtera atau KMS, memiliki kartu keluarga atau C1, memiliki akta kelahiran (untuk anak kandung AK, untuk anak angkat AA, dan untuk

---

<sup>38</sup> Leaflet petunjuk teknis Jaminan Pendidikan Daerah Kota Yogyakarta

anak tiri AT), memiliki keterangan bahwa peserta didik telah diterima atau sedang bersekolah di sekolah yang berada di luar Yogyakarta, semua persyaratan diatas harus diverifikasi oleh kelurahan setempat dan dilegalisir oleh DINSOSNAKERTRANS kota Yogyakarta. Selanjutnya peserta didik dan orang tua peserta didik menyerahkan semua berkas kelengkapan kepada UPT Jaminan Pendidikan.

Kegiatan lain yang mendukung kelancaran program JPD antara lain adanya sosialisasi antara UPT Jaminan Pendidikan dengan kelurahan di kota Yogyakarta. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada masyarakat maupun pihak kelurahan itu sendiri tentang program JPD. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini untuk memberikan arahan dan pengetahuan informasi mengenai JPD kepada warga masyarakat ditingkat kelurahan agar nantinya informasi yang didapat benar serta sesuai dengan prosedur yang ada serta meminimalisir adanya penyimpangan dan kesalahan informasi.<sup>39</sup>

Tidak hanya melalui forum sekolah dan kelurahan, UPT Jaminan Pendidikan juga bekerja sama dengan penerima KMS dan media massa. Untuk penerima KMS itu sendiri, UPT mengadakan suatu forum diskusi dan sosialisasi disetiap sekolah pada saat ajaran baru dan kenaikan kelas dibeberapa sekolah. Hal ini dilakukan untuk memberikan arahan kepada orang tua peserta didik serta peserta didik itu sendiri mengenai program jaminan yang akan diterima untuk masing-masing jenjang sekolah yang peserta didik tempuh. Sedangkan untuk kegiatan kerjasama antara UPT Jaminan

---

<sup>39</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mawardi.Op.cit

Pendidikan dengan media massa dilakukan dengan sangat intensif mengingat program ini merupakan salah satu program yang cukup disoroti oleh berbagai pihak sehingga perlu adanya monitoring melalui bantuan media massa. Monitoring yang dilakukan oleh media masa ini dilakukan agar semua elemen masyarakat mengetahui dan melihat bagaimana jalannya program JPD ini sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.<sup>40</sup>

### **3. Pendataan peserta didik penerima program Jaminan Pendidikan Daerah.**

Pendataan merupakan tahap lanjutan dari pelaksanaan sosialisasi program JPD. Pendataan ini dimaksudkan untuk mendata peserta didik yang menerima jaminan pendidikan daerah sesuai dengan data yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dengan adanya pendataan ini diharapkan jaminan pendidikan daerah dapat diterima oleh peserta didik sesuai dengan sasaran program. Untuk tahap pendataan keluarga miskin dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan cara mendata keluarga miskin sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan melalui keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 417/KEP/2009 Tentang Parameter Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta. Selanjutnya dari hasil pendataan keluarga miskin tersebut diberikan identitas diri bagi warga masyarakat yang terdaftar menjadi keluarga yang tergolong miskin dengan identitas diri berupa Kartu Menuju Sehat atau KMS.<sup>41</sup> Kemudian data tersebut diberikan kepada Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis atau UPT Jaminan

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian KMS Bapak Tri Hastomo di Dinsosakertrans.



Pendidikan yang selanjutnya data KK miskin yang ada diolah oleh UPT JPD untuk mengetahui jumlah warga masyarakat yang masih dalam usia sekolah untuk mendapatkan JPD.

Untuk tahun 2009 jumlah KK miskin yang ada sebanyak 21228. Dari jumlah tersebut diperoleh data ternyata jumlah warga masyarakat kota Yogyakarta yang masih dalam usia sekolah sebanyak 18733 siswa. Dari data tersebut ternyata jumlah peserta didik yang mendaftar untuk program JPD sebanyak 17259 siswa. Dari hasil tersebut dapat diketahui ternyata 94.03 % peserta didik yang mendaftar dan hanya 6,97% yang tidak mendaftar.<sup>42</sup>

#### **4. Penyaluran dana**

Sumber daya financial atau keuangan menjadi faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu program kebijakan. Dengan sumber keuangan yang mencukupi maka suatu program kebijakan dapat berjalan baik serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sumber keuangan itu sendiri tidak sepenuhnya mutlak mempengaruhi keberhasilan suatu program kebijakan tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang baik untuk mengolah sumber keuangan tersebut. Dalam program JPD yang menjadi fokus penulis, sumber keuangan ini didapat dari APBD kota Yogyakarta sesuai dengan anggaran dan rincian pengeluaran yang dilakukan oleh UPT Jaminan Pendidikan. Untuk tahun 2007 dan 2008 rincian anggaran yang dimaksud terdiri dari biaya regular, registrasi, heregistrasi, seragam osis dan olah raga, serta biaya praktek untuk peserta didik pada jenjang SMK. Yang dimaksud

---

<sup>42</sup> Data penerima KMS oleh UPT Jaminan Pendidikan Dacrah.

dengan biaya regular adalah biaya SPP untuk masing-masing jenjang sekolah, registrasi merupakan biaya yang diberikan untuk peserta didik baru, heregistrasi merupakan biaya bagi peserta didik lama sedangkan biaya seragam osis dan olah raga untuk peserta didik baru disetiap jenjang pendidikan.<sup>43</sup> Pembagian pembiayaan berdasarkan kategori diatas ternyata kurang efisien dan tidak memiliki dasar yang kuat. Untuk itu sejak tahun 2009 kategori untuk pembiayaan berubah menjadi biaya operasional dan seragam sekolah berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 55/KEP/2009 Tentang Penetapan Basaran Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik Pemegang Kartu Menuju Sehat atau KMS. Biaya operasional ini terdiri dari biaya regular, registrasi, heregistrasi, praktek serta biaya lain diluar biaya seragam sekolah. Berikut data rincian pembiayaan setiap jenjang sekolah berdasarkan kategori diatas untuk tahun 2009 :

---

<sup>43</sup> Berdasarkan hasil wawancara Bapak Mannarima, pada hari Kamis, 18 November 2010 pukul 09.30 wib.

Tabel 3.1

Tabel Besaran Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik Tahun 2009

No	Satuan Pendidikan	Klasifikasi	Rincian Penggunaan	Jumlah (Rp)
1	TK/RA	Negeri	Pembelian seragam	140.000
		Swasta	Biaya operasional	560.000
			Pembelian seragam	140.000
2	SD	Negeri	Pembelian seragam dan buku	165.000
	SD	Swasta	Biaya operasional	250.000
			Pembelian seragam dan buku	165.000
	MI	Negeri,swasta	Biaya operasional	250.000
			Pembelian seragam dan buku	165.000
	3	SMP	Negeri	Pembelian seragam dan buku
Swasta, Kelas VII			Biaya operasional	625.000
			Pembelian seragam dan buku	225.000
Kelas VIII,IX			Biaya operasional	625.000
			Pembelian seragam dan buku	225.000

No	Satuan Pendidikan	Klasifikasi	Rincian Penggunaan	Jumlah (Rp)	
4	SMA,MA	Negeri,swasta	Kelas X	Biaya operasional	1.400.000
				Pembelian seragam dan buku	350.000
		Kelas XI,XII	Biaya operasional	1.200.000	
			Pembelian buku	100.000	
5	SMK	Negeri,swasta	Biaya operasional	1.950.000	
			Kelas X	Biaya praktek	450.000
			Pembelian seragam dan buku	300.000	
		Kelas XI,XII	Biaya operasional	1.750.000	
			Biaya praktek	450.000	
			Pembelian buku	50.000	

Sumber data : Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah Kota Yogyakarta

Dari data yang disajikan diatas terlihat bahwa biaya antara sekolah negeri dan swasta cukup berbeda terkait dengan besaran biaya yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan sekolah negeri sudah mendapatkan bantuan dana pendidikan melalui program pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah oleh Pemerintah Pusat, serta bantuan lain melalui iuran wali peserta didik. Sedangkan untuk sekolah swasta bantuan tersebut tidak diberikan sehingga dalam rincian besaran biaya pada Jaminan Pendidikan Daerah atau JPD sekolah swasta mendapat jumlah yang cukup besar

dibandingkan sekolah negeri.<sup>44</sup> Selain itu faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah adanya jumlah peserta didik miskin yang lebih banyak menempuh pendidikan pada sekolah swasta. Hal ini dikarenakan kelemahan dan ketidakmampuan peserta didik pada waktu seleksi penerimaan peserta didik baru disekolah negeri. Karena itulah dengan adanya program JPD ini hal-hal yang tidak diinginkan tersebut dapat diatasi atau setidaknya dapat dikurangi.

Untuk tahun 2009 yang menjadi fokus penulis, kuota yang disediakan berjumlah 18733 dengan dana sebesar Rp 18.128.096.000. Dari jumlah kuota tersebut ternyata hanya 17259 total peserta didik yang mendapat JPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Tabel Rekapitulasi Data KMS Tahun 2009

**TAHAP I**

No	Jenjang	Peserta	Dana (Rp)
1	TK, RA, TKLB	1782	1.246.840.000
2	SD, MI, SDLB	7067	1.880.305.000
3	SMP, MTs, SMPLB	3489	2.248.225.000
4	SMA, MA, SMALB	717	1.459.505.000
5	SMK	2310	5.903.800.000

Sumber data : Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah Kota Yogyakarta

<sup>44</sup> Ibid.

Dari data diatas dapat dilihat jumlah peserta didik untuk TK, RA, TKLB tahun 2009 peserta didik berjumlah 1782 dengan dana Rp 1.246.840.000,- SD, MI, SDLB tahun 2009 peserta didik berjumlah 7067 dengan dana Rp 1.880.305.000,- SMP, MTs, SMPLB tahun 2009 peserta didik berjumlah 3489 dengan dana Rp 2.248.225.000,- SMA, MA, SMALB tahun 2009 peserta didik berjumlah 717 dengan dana Rp 1.459.505.000,- SMK tahun 2009 peserta didik berjumlah 2310 dengan dana Rp 5.903.800.000,- . Seluruh dana yang ada dimasing-masing jenjang pendidikan diatas disesuaikan dengan besaran dana yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Nomor 55/KEP/2009 Tentang Penetapan Besaran Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik Pemegang Kartu Menuju Sejahtera atau KMS. Dari data diatas jumlah peserta untuk jenjang SMK lebih banyak dibanding dengan jenjang pendidikan yang lain. Hal ini dikarenakan banyak keluarga miskin lebih mengarahkan peserta didik untuk dapat memiliki ketrampilan lebih agar nantinya dapat dipergunakan untuk mencari kerja ataupun membuka lapangan kerja baru sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Ibid.

Tabel 3.3

Tabel Rekapitulasi Data KMS Tahun 2009

**TAHAP II**

No	Jenjang	Peserta	Dana (Rp)
1	TK, RA, TKLB	48	33.600.000
2	SD, MI, SDLB	172	67.380.000
3	SMP, MTs, SMPLB	139	124.500.000
4	SMA, MA, SMALB	45	92.250.000
5	SMK	216	580.500.000
7	Kekurangan biaya OPS tahap I untuk SD	-	91.000.000
8	Kekurangan biaya OPS tahap I untuk SMK	-	366.500.000

Sumber data : Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah Kota Yogyakarta

Tabel II merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan setelah terdapat peserta didik baru yang mendaftar melalui sekolah terkait maupun UPT JPD. Dari data diatas dapat dilihat jumlah peserta didik untuk TK, RA, TKLB tahun 2009 peserta didik berjumlah 48 dengan dana Rp 33.600.000,- SD, MI, SDLB tahun 2009 peserta didik berjumlah 172 dengan dana Rp 67.380.000,- SMP, MTs, SMPLB tahun 2009 peserta didik berjumlah 139 dengan dana Rp 124.500.000,- SMA, MA, SMALB tahun 2009 peserta didik berjumlah 45 dengan dana Rp 92.250.000,- SMK tahun 2009 peserta didik berjumlah 216 dengan dana Rp 580.500.000,- Selanjutnya terdapat kekurangan

biaya operasional yang dilakukan pada Tahap I yaitu untuk SD sebesar Rp 91.000.000,- SMK sebesar Rp 366.500.000,- . Keseluruhan dana yang ada di masing-masing jenjang pendidikan diatas disesuaikan dengan besaran dana yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Nomor 55/KEP/2009 Tentang Penetapan Besaran Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik Pemegang Kartu Menuju Sejahtera atau KMS. Dari data rekapitulasi Tahap II jumlah peserta untuk jenjang SMK juga lebih banyak dibanding dengan jenjang pendidikan yang lain. Hal ini dikarenakan banyak keluarga miskin lebih mengarahkan peserta didik untuk dapat memiliki ketrampilan lebih agar nantinya dapat dipergunakan untuk mencari kerja ataupun membuka lapangan kerja baru sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki.<sup>46</sup>

Tabel 3.4

Tabel Rekapitulasi Data KMS Tahun 2009

**TAHAP III**

No	Jenjang	Peserta	Dana (Rp)
1	TK, RA, TKLB	2	1.400.000
2	SD, MI, SDLB	2	830.000
3	SMP, MTs, SMPLB	9	7.750.000
4	SMA, MA, SMALB	3	6.150.000
5	SMK	27	76.050.000

Sumber data : Unit Pelaksana Teknis Kota Yogyakarta

<sup>46</sup> Ibid.



Tahap III dilakukan apabila terdapat peserta didik baru yang mendaftar disekolah terkait maupun melalui UPT JPD. Dari data diatas dapat dilihat jumlah peserta didik untuk TK, RA, TKLB tahun 2009 peserta didik berjumlah 2 dengan dana sebesar Rp 1.400.000,- SD, MI, SDLB tahun 2009 peserta didik berjumlah 2 dengan dana sebesar Rp 830.000,- SMP, MTs, SMPLB tahun 2009 peserta didik berjumlah 9 dengan dana Rp 7.750.000,- SMA, MA, SMALB tahun 2009 peserta didik berjumlah 3 dengan dana Rp 6.150.000,- SMK tahun 2009 peserta didik berjumlah 27 dengan dana Rp 76.050.000,- Seluruh dana yang ada dimasing-masing jenjang pendidikan diatas disesuaikan dengan besaran dana yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Nomor 55/KEP/2009 Tentang Penetapan Besaran Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik Pemegang Kartu Menuju Sejahtera atau KMS. Untuk tahap III jumlah peserta didik juga lebih banyak dijenjang SMK. Hal ini dikarenakan banyak keluarga miskin lebih mengarahkan peserta didik untuk dapat memiliki ketrampilan lebih agar nantinya dapat dipergunakan untuk mencari kerja ataupun membuka lapangan kerja baru sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ibid.

Tabel 3.5

## Tabel Rekapitulasi Data KMS Tahun 2009

## Hasil updating data tahun 2009

No	Jenjang	Peserta	Dana (Rp)
1	TK, RA, TKLB	132	92.400.000
2	SD, MI, SDLB	614	192.810.000
3	SMP, MTs, SMPLB	286	189.150.000
4	SMA, MA, SMALB	67	133.150.000
5	SMK	132	354.600.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>17259</b>	<b>15.602.615.000</b>

Sumber data : Unit Pelaksana Teknis Jaminan Pendidikan Daerah Kota Yogyakarta

Dari kegiatan penyaluran dana serta pendataan jumlah peserta penerima JPD yang dilakukan melalui Tahap I, II, III ternyata terdapat data lanjutan baru yang belum masuk dalam daftar penerima pada Tahap I, II, III. Dari data diatas dapat dilihat jumlah peserta didik untuk TK, RA, TKLB tahun 2009 peserta didik berjumlah 132 dengan dana Rp 92.400.000,- SD, MI, SDLB tahun 2009 peserta didik berjumlah 614 dengan dana Rp 192.810.000,- SMP, MTs, SMPLB tahun 2009 peserta didik berjumlah 286 dengan dana Rp 189.150.000,- SMA, MA, SMALB tahun 2009 peserta didik berjumlah 67 dengan dana Rp 133.150.000,- SMK tahun 2009 peserta didik berjumlah 132 dengan dana Rp 354.600.000,- Seluruh dana yang ada di masing-masing jenjang pendidikan diatas disesuaikan dengan besaran dana yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Nomor 55/KEP/2009 Tentang

Penetapan Besaran Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik Pemegang Kartu Menuju Sehat atau KMS. Dari data diatas jumlah peserta pada jenjang pendidikan SD, MI, SDLB lebih besar dibanding dengan jenjang pendidikan yang lain karena banyak sekolah SD yang belum terjangkau pada tahap I, II, dan III.<sup>48</sup>

Tabel 3.6

Tabel Rekapitulasi Data KMS Tahun 2009

**REKAP DATA**

No	Jenjang	Peserta	Dana (Rp)
1	TK, RA, TKLB	1964	1.374.240.000
2	SD, MI, SDLB	7851	2.232.325.000
3	SMP, MTs, SMPLB	3923	2.569.625.000
4	SMA, MA, SMALB	832	1.690.600.000
5	SMK	2684	7.281.450.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>17254</b>	<b>15.148.240.000</b>
<b>Setor kas daerah tidak diambil</b>		<b>-</b>	<b>51.090.000</b>

Sumber data : Unit Pelaksana Teknis Kota Yogyakarta

Dari tabel 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5 selajutnya dijumlah untuk masing-masing peserta didik pada jenjang pendidikan. Untuk TK, RA, TKLB tahun 2009 peserta didik berjumlah 1964 dengan dana Rp 1.374.240.000,- SD, MI, SDLB tahun 2009 peserta didik berjumlah 7851 dengan dana Rp 2.232.325.000,- SMP, MTs, SMPLB tahun 2009 peserta didik berjumlah 3923 dengan dana Rp 2.569.625.000,- SMA,

<sup>48</sup> Ibid

MA, SMALB tahun 2009 peserta didik berjumlah 832 dengan dana Rp 1.690.600.000,- SMK tahun 2009 peserta didik berjumlah 2684 dengan dana Rp 7.281.450.000,-. Dari data diatas ternyata jumlah peserta untuk jenjang pendidikan SD, MI, SDLB lebih besar dari jenjang pendidikan yang lain. Ini dikarenakan jumlah peserta didik pada jenjang SD, MI, SDLB di Kota Yogyakarta sangat banyak mencapai 7851 siswa.

Tabel 3.7

Tabel serapan dana Jaminan Pendidikan Daerah atau JPD

No	Kategori	Dana (Rp)
1	JPD KMS	15.551.525.000
2	Tunggakan biaya pendidikan	1.099.730.200
<b>Total Jumlah Dana</b>		<b>16.651.255.200</b>

Sumber data : Unit Pelaksana Teknis Kota Yogyakarta

Selanjutnya diperoleh data untuk masing-masing dana, untuk penerima JPD KMS didapat dana sebesar Rp 15.551.525.000,- Tunggakan biaya pendidikan sebesar Rp 1.099.730.200,- Sehingga total dana yang terealisasi sebesar Rp 16.651.255.200,- dari total dana APBD sebesar Rp 18.128.096.000,-Biaya untuk JPD KMS merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk membantu peserta didik yang berasal dari keluarga penerima Kartu Menuju Sejahtera atau KMS. Sedangkan untuk biaya tunggakan pendidikan diberikan oleh pemerintah kota

Yogyakarta bagi peserta didik dari keluarga miskin yang kesulitan dalam pengambilan ijazah karena faktor tunggakan biaya yang belum diselesaikan.<sup>49</sup>

## 5. Monitoring, Evaluasi dan Laporan

Monitoring merupakan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan dapat berjalan dengan semestinya. Dalam Jaminan Pendidikan Daerah kegiatan monitoring ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara jumlah peserta didik penerima Jaminan Pendidikan dengan dana yang disediakan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan yang berlangsung sesuai dengan data yang ada dan tidak menimbulkan penyalahgunaan dan penyimpangan-penyimpangan dana.

Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh para implementator. Dalam Jaminan Pendidikan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan JPD dapat berjalan dengan baik. Jika dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan atau kekurangan dapat dijadikan penilaian dan rencana untuk kegiatan ditahun berikutnya.<sup>50</sup>

Laporan merupakan kegiatan akhir dari suatu program kebijakan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban UPT Jaminan Pendidikan Daerah kepada Walikota Yogyakarta selaku penanggungjawab akhir program kebijakan ini. Untuk itu dalam kegiatan laporan ini perlu adanya data-data yang akurat berdasarkan pada pelaksanaan dan hasil dari kegiatan pelaksanaan tersebut.

---

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid.

Dalam pelaksanaan program Jaminan Pendidikan Daerah, kegiatan monitoring, evaluasi dan laporan ini kurang diperhatikan oleh para pelaksana JPD karena dirasa sudah sesuai dengan rencana kegiatan yang diinginkan.<sup>51</sup>

Dari rencana program diatas, selanjutnya dapat dilihat beberapa indikator keberhasilan antara lain :

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah untuk siswa pemegang KMS di Kota Yogyakarta Tahun 2009.**

Selanjutnya untuk melihat sejauh mana keberhasilan implementasi program Jaminan Pendidikan Daerah atau JPD untuk siswa pemegang Kartu Menuju Sehat atau KMS diperlukan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Jaminan Pendidikan Daerah atau JPD. Faktor-faktor tersebut antara lain :

### **1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting dari beberapa faktor yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan suatu implementasi program. Dengan adanya komunikasi yang baik antar pelaksana program menjadikan suatu program akan berjalan efektif sesuai dengan tujuan diadakannya program tersebut.<sup>52</sup> Komunikasi yang akurat dan kecermatan yang dimiliki oleh pelaksana juga mempengaruhi keberhasilan suatu program. Keberhasilan suatu program tidak hanya dipengaruhi oleh komunikasi yang terjadi antara implementator tetapi sikap atau

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Budi, Winamo. Op.cit Hal 174

pandangan pribadi yang ada dan melekat dalam setiap implementator juga menjadi faktor kuat untuk menjadikan suatu komunikasi berjalan dengan semestinya.

Dalam komunikasi terdapat beberapa aspek penting yang mendukung komunikasi berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan program kebijakan. Aspek tersebut antara lain : Transmisi, aspek ini terjadi ketika suatu program kebijakan mulai dibuat atau dijalankan oleh implementator. Dalam menjalankan tujuan serta perintah-perintah yang ada dalam suatu program kebijakan biasanya terjadi pertentangan dalam mentransmisikan perintah implementasi. Pertentangan itu biasanya terjadi karena ada perbedaan pendapat antara para pelaksana dan perintah yang diberikan oleh pengambil kebijakan. Untuk itu aspek transmisi ini perlu perlu disadari oleh semua pihak yang terlibat agar program dapat berjalan dengan baik.<sup>53</sup>

Aspek lain adalah kejelasan informasi, merupakan aspek kedua setelah adanya transmisi. Kejelasan informasi yang diberikan antara pembuat keputusan dengan para pelaksana sering mengalami kendala karena adanya ketidak jelasan informasi dan teknik petunjuk yang jelas mengenai program yang sedang dijalankan. Selain itu ketidak jelasan pesan komunikasi akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan memungkinkan terjadi pertentangan antara informasi awal dengan informasi yang diterima.<sup>54</sup>

Untuk program Jaminan Pendidikan Daerah atau JPD komunikasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan UPT JPD dengan sekolah-sekolah dalam

---

<sup>53</sup> Ibid. hal 176

<sup>54</sup> Ibid. Hal 179

dan luar kota, serta adanya kerjasama dengan para pelaksana yang ada dilingkungan kelurahan, selain itu komunikasi juga terlihat dengan diadakannya forum komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana dan masyarakat yang menjadi sasaran program. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala UPT JPD Bapak Mannarima selaku Kepala TU UPT JPD. Berikut petikan wawancara

:

*“Sulit bagi kita untuk melaksanakan dan menyampaikan informasi jika tidak dibantu oleh stakeholder yang lain seperti kelurahan, sekolah, serta warga masyarakat miskin yang menjadi target sasaran kami. Untuk itu tidak mene kami selaku pengelola UPT JPD melakukan sosialisasi terhadap pihak kelurahan setiap 3 kali dalam setahun. Waktu yang kami lakukan untuk sosialisasi tidak dapat ditentukan karena adanya beberapa kendala antara lain : adanya kesulitan penetapan waktu yang ada antara nara sumber serta staf yang ada sehingga perlu adanya persiapan waktu yang mencukupi serta kematangan rencana program. Tetapi hal ini berbeda ketika kita melakukan sosialisasi disekolah karena kita melakukannya ketika ada kenaikan kelas maupun kelulusan siswa sehingga mudah untuk menetapkan waktu antara pihak sekolah dengan warga ,asyarakat dan pelaksana yang lain.”*

Selain itu dukungan dari masyarakat juga terlihat melalui beberapa forum komunikasi yang melibatkan banyak warga masyarakat kota Yogyakarta serta media massa sebagai alat untuk kegiatan monitoring. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Mannarima :

*“Program ini merupakan program yang baru dan harus dimonitoring setiap waktu. Untuk itu ketika kita melakukan kerjasama dengan masyarakat mereka sangat antusias dan berminat untuk ikut bekerja sama mensukseskan program ini. Untuk itulah kami tidak terlalu kesulitan mengkomunikasikan dengan masyarakat. Terkait dengan media masa kita selalu kedatangan para jurnalistik dari beberapa Koran maupun radio dan televise local karena mereka menganggap program ini sangat menarik dan perlu dipantau setiap waktu.”*



Komunikasi yang dilakukan oleh UPT JPD dengan stakeholder yang lain sudah cukup baik dilakukan. Ini sesuai dengan asas objektif yang ada dalam peraturan walikota nomor 4 tahun 2009 tentang pedoman pemberian jaminan pendidikan daerah. Dimana dengan adanya komunikasi yang baik akan memudahkan pencapaian tujuan program serta target sasaran yang diinginkan.

Tetapi dilihat dari segi komunikasi yang dilakukan antara Kepala UPT JPD dengan para staf yang ada dinilai kurang baik. Ini terlihat dari tidak adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas untuk masing-masing staf yang ada di UPT JPD sehingga banyak terjadi tumpang tindih tugas dan tanggungjawab antar staf yang berakibat pada pengerjaan tugas yang dilakukan oleh satu staf saja.<sup>55</sup> Jika hal ini terus dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah baru diwaktu yang akan datang.

## **2. Sumber daya**

Sumber daya dalam implementasi kebijakan merupakan faktor lain untuk menentukan keberhasilan suatu program. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya financial atau keuangan, sumber daya manusia terkait dengan staff ahli yang menangani program, wewenang, atau fasilitas yang diperlukan untuk mendukung jalannya suatu program.<sup>56</sup> Sumber daya financial atau keuangan menjadi sangat penting sebagai faktor untuk menentukan keberhasilan suatu program. Dengan adanya sumber keuangan yang mencukupi akan menjadikan program dapat berjalan

---

<sup>55</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Tu UPT Jaminan Pendidikan Daerah Bapak Mannarima, pada hari Kamis, 23 November 2010 pukul 13.30 wib.

<sup>56</sup> Budi, Winarno. Op.cit Hal 181

lancar. Tetapi sumber daya keuangan ini tidak dapat berjalan baik tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas baik. Sumber daya untuk program Jaminan Pendidikan Daerah atau JPD tahun 2009 dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dengan adanya komitmen yang tinggi oleh masing-masing staf UPT JPD serta para stakeholder dalam program JPD ini. Untuk sumber daya keuangan atau financial cukup memenuhi untuk peserta didik pada tahun 2009 ini. Seperti yang diungkapkan Bapak Mawardi berikut :

*“Terkait dengan sumber daya keuangan atau financial kami tidak pernah mengalami kesulitan karena setiap kali kita mengajukan anggaran selalu diterima oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Hal ini karena rincian dana serta kegunaan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Untuk tahun 2009 ini saja anggaran yang ada sebanyak 18 M dan dana tersebut telah kami salurkan dengan rincian dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.”*

Untuk sumber daya manusia atau staff ahli kurang dapat berperan baik. Ini terlihat dengan masih adanya staf yang tidak memiliki kemampuan dan ketrampilan dibidang IT sehingga olah data hanya dilakukan oleh salah satu staf yang berdampak pada lamanya waktu yang diperlukan untuk mengolah input yang ada.<sup>57</sup> Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Mannarima :

*“Untuk kemampuan staf dalam mengelola peralatan IT memang belum sepenuhnya mampu. Hal ini menjadi pemacu bagi kita untuk terus belajar serta mengadakan pengarahan secara periode. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan menjadi tantangan serta permasalahan baru diwaktu yang akan datang. Tetapi beruntung masih ada dua staf yang paham masalah IT sehingga tidak terlalu sulit bagi kita.”*

---

<sup>57</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mannarima, Op.cit

### 3. Disposisi

Dalam suatu kebijakan setiap sikap pelaksana atau implementator sangat menentukan keberhasilan suatu program kebijakan. Apabila implementator memiliki disposisi atau sikap baik dan dukungan maka program kebijakan kemungkinan besar akan berjalan sesuai dengan tujuan semula oleh pembuat kebijakan. Sikap yang dimiliki oleh pembuat keputusan dan para pelaksana juga menjadikan suatu program berjalan dengan baik. Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana memiliki kecenderungan atau sikap positif dan dukungan terhadap suatu kebijakan atau program maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi akan berjalan baik. Demikian sebaliknya jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak suatu program karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.<sup>58</sup>

Untuk program Jaminan Pendidikan Daerah atau JPD yang diberlakukan di kota Yogyakarta terlihat adanya peran yang cukup baik antara para pelaksana program atau implementator. Hal ini dapat dilihat dengan adanya komitmen yang kuat oleh para pelaksana program untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>59</sup> Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mawardi berikut :

*"Tim di UPT JPD merupakan tim yang dibentuk dari orang-orang yang memiliki komitmen tinggi serta kejujuran dan jauh dari kepentingan-*

<sup>58</sup> Budi, Winarno. Op.cit Hal 194

<sup>59</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mannarima, Op.cit

*kepentingan khusus sehingga kami benar-benar melaksanakan program JPD ini sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh pembuat program. Untuk itulah amanah yang diberikan kepada kami benar-benar kami pegang teguh."*

Sikap para pelaksana dalam memberikan pelayanan program terlihat dari adanya ketepatan waktu dan prosedur dalam melayani masyarakat serta tidak adanya kepentingan politik yang mendasari dikeluarkannya program Jaminan Pendidikan Daerah ini. Seperti yang diungkapkan Bapak Mawardi berikut ini :

*"Kita selalu menjaga ketepatan waktu dan ketepatan data. Pelayanan yang baik akan memudahkan masyarakat serta dapat mengefektifkan program kegiatan yang kami lakukan sehingga kerjasama antara UPT dengan masyarakat benar-benar kami utamakan dan selalu kami lakukan."*

Selain itu komitmen yang tinggi serta kejujuran juga dilakukan oleh pihak sekolah terhadap masyarakat miskin yang mendapatkan JPD. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa masyarakat miskin yang penulis temui. Berikut petikan wawancara :

*"Setiap tahun saya tidak pernah dibebani dengan masalah pembiayaan sekolah. Karena ada program JPD yang membantu pembayaran sekolah. Setiap penerimaan raport dan pertemuan wali murid pihak sekolah selalu memberikan rincian dana yang harus dibayarkan. Untuk itu kami benar-benar mengerti dan mengetahui berapa jumlah dana yang berasal dari UPT JPD serta rincian dana yang digunakan. Selain itu jika ada sisa dana akan langsung diberikan ditabungan siswa agar dapat dipergunakan untuk tahun yang akan datang jika masih menerima tetapi jika tidak dapat dikembalikan kepada wali murid."*

Hal ini menunjukkan adanya asas transparan berdasarkan peraturan walikota nomor 4 tahun 2009 tentang pedoman pemberian JPD. Trasparan ini terbukti dengan adanya kejelasan data serta rincian yang bisa dipertanggung jawabkan baik oleh masyarakat maupun UPT JPD.

#### 4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan institusi yang paling banyak diamati dan disoroti oleh banyak pihak mengingat birokrasi di negara kita sangat banyak dan rumit. Birokrasi merupakan institusi yang sering terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.<sup>60</sup> Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah tetapi juga dalam organisasi-organisasi swasta. Bahkan dalam beberapa kebijakan birokrasi diciptakan untuk menjalankan kelancaran kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama antar institusi birokrasi. Ketika suatu birokrasi tidak kondusif terhadap suatu implementasi kebijakan akan menyebabkan ketidak efektifan pelaksanaan kebijakan.

Struktur birokrasi yang mendukung jalannya program jaminan pendidikan daerah atau JPD, antara lain: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, serta stakeholder lain yang mendukung jalannya program pelaksanaan JPD. Masing-masing birokrasi ini memiliki tanggung jawab serta tugas yang harus dijalankan. Untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki tugas menyediakan data keluarga miskin dan jumlah penduduk miskin kota Yogyakarta. Tugas ini sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasar peraturan walikota No.56 tahun 2009 tentang Pendataan keluarga miskin. Selanjutnya dari data yang ada diberikan kepada Dinas Pendidikan melalui UPT jaminan pendidikan untuk

---

<sup>60</sup> Budi, Winarno. Op.cit Hal 202

selanjutnya diolah terkait dengan jumlah warga masyarakat miskin kota Yogyakarta yang masih dalam usia sekolah.

Dengan melihat struktur birokrasi yang ada di UPT Jaminan Pendidikan dapat dikatakan kurang baik dalam proses pelaksanaannya. Melihat tugas dan fungsi UPT Jaminan Pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memiliki tugas dan fungsi yang sangat banyak untuk program JPD. Untuk itu perlu adanya jumlah staf yang mencukupi dalam melaksanakan seluruh tugas dan fungsi tersebut. Selama ini jumlah staf yang ada di UPT JPD hanya berjumlah 5 orang dengan kemampuan dan ketrampilan yang masih kurang dimiliki oleh beberapa staf lainnya.<sup>61</sup> Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Mannarima :

*“Terus terang kami sangat kesulitan dan membutuhkan staf tambahan mengingat sangat minimnya staf yang ada di UPT serta kurangnya kemampuan di bidang IT oleh staf kami. Untuk itu kedepannya nanti kita perlu mengadakan staf tambahan yang benar-benar terampil serta menguasai IT.”*

---

<sup>61</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mannarima, Op.cit